

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

**Dede Jaelani<sup>1</sup>, Kurhayadi<sup>2</sup>, Deden Hadi Kushendar<sup>3</sup>**

*Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Bandung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>*

E-mail: [dede.jaelani@stiabandung.ac.id](mailto:dede.jaelani@stiabandung.ac.id)<sup>1</sup>

### **ABSTRAK**

*Tujuan penulisan artikel ini ialah untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun metode Riset menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun permasalahannya pelaksanaan kebijakan pemeliharaan kendaraan dinas, operasional belum optimal. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: Struktur organisasi, sumberdaya, komunikasi, dan disposisi. Sementara ini pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan secara komperhensif, yang meliputi pemeliharaan kendaraan dan SOP nya. Sumber daya manusia belum memadai dimana belum memiliki tenaga ahli dalam penilaian aset atas pelaksanaan kebijakan pemeliharaan kendaraan dinas. Dalam melakukan inovasi dan terobosan dalam pelayanan kepada pegawai, dapat dilakukan diskresi pelaksanaan kebijakan publik sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.*

**Kata Kunci:** *Implementasi Kebijakan*

### **ABSTRACT**

*The purpose of writing this article is to find out how far the Implementation of the Operational Service Vehicle Maintenance Policy at the General Bureau of the Regional Secretariat of West Java Province. The research method uses a qualitative approach. The problem is the implementation of official vehicle maintenance policies, operations are not optimal. The results of the discussion show that the implementation of public policies is influenced by several factors, including: organizational structure, resources, communication, and dispositions. Meanwhile, the implementation of the policy needs to be carried out in a comprehensive manner, which includes maintenance of vehicles and their SOPs. Inadequate human resources where there are no experts in asset valuation for the implementation of official vehicle maintenance policies. In carrying out innovations and breakthroughs in service to employees, discretion can be exercised in the implementation of public policies as long as they do not conflict with applicable norms and regulations.*

**Keywords:** *Policy Implementation*

## **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan Negara dilakukan dengan memobilisasi semua potensi dari aparatur negara dan sumber daya lainnya guna mencapai tujuan negara. Peran negara dan pemerintah tidak hanya terbatas pada pembuatan kebijakan, tetapi juga melibatkan jaminan pelaksanaan kebijakan tersebut. Seperti yang dikemukakan dalam konsep kebijakan publik oleh Dye (2008:1), kebijakan publik ialah segala tindakan yang dipilih atau tidak dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan. Apapun bentuk kebijakan tersebut, kesuksesannya akhirnya tergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait satu sama lain. Grindel (1980:7) menggambarkan implementasi sebagai proses administratif yang dapat diselidiki pada tingkat program tertentu. Implementasi kebijakan ialah bidang yang luas, mencakup bagaimana implementasi berfungsi sebagai alat administrasi hukum dan sekaligus dilihat sebagai fenomena kompleks dalam proses atau hasil dari kebijakan (Situmorang, 2016).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014, Barang Milik Daerah (BMD) merujuk kepada semua jenis barang yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) atau melalui sumber lain yang sah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama, salah satunya ialah menjaga aset daerah. Aset daerah ialah faktor pendukung penting dalam menjalankan pemerintahan daerah dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan yang efisien dan administratif yang tertib diperlukan untuk memastikan agar aset daerah dapat memberikan manfaat dan hasil yang maksimal.. Pentingnya bagi organisasi untuk memiliki kebijakan dan prosedur pemeliharaan aset daerah yang baik seperti kendaraan dinas operasional. Pemeliharaan ini meliputi jadwal perawatan rutin, pemeriksaan berkala, pemantauan kinerja kendaraan, dan pelatihan untuk pengemudi agar mereka dapat mengidentifikasi tanda-tanda masalah potensial. Dalam Pasal 1 Angka 8 Peraturan dalam negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelolaan Barang ialah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Dengan mengimplementasikan kebijakan pemeliharaan yang efektif, organisasi dapat memastikan bahwa kendaraan operasional mereka tetap dapat diandalkan dan memenuhi standar keamanan yang diperlukan. Kebijakan

pemeliharaan kendaraan dinas operasional biasanya mencakup prosedur dan pedoman yang ditetapkan untuk menjaga kondisi dan keandalan kendaraan dinas. Hal ini dilakukan untuk memastikan kendaraan tetap berfungsi dengan baik, aman, dan siap digunakan dalam menjalankan tugas-tugas operasional. Kendaraan Dinas ialah kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan sarana transportasi lain milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan pelaksanaan tugas aparatur pemerintah, terdiri dari kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional.

Kendaranaan dinas ialah aset daerah yang termasuk kedalam asset tetap golongan peralatan dan mesin yang dimaksudkan untuk dimanfaatkan penggunaannya demi mendukung dan memudahkan dalam memberikan pelayanan kepada pegawai atau publik. Kendaraan operasional dinas ialah aset yang sangat penting untuk menjalankan berbagai kegiatan dan tugas sehari-hari. Kendaraan ini digunakan untuk transportasi pegawai, pengiriman barang, kunjungan lapangan, dan berbagai keperluan operasional lainnya. Oleh karena itu, pemeliharaan kendaraan menjadi krusial untuk menjaga kelancaran operasional organisasi. Kendaraan dinas operasional yang terjaga kondisinya melalui pemeliharaan rutin memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi. Dengan menjaga kualitas dan kinerja kendaraan,

organisasi dapat menghindari kegagalan yang tidak diinginkan, penundaan dalam pelaksanaan tugas, atau kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pegawai

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 3 Tahun 2011 Kendaraan Dinas ialah kendaraan yang dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan jabatan dinas, kendaraan operasional dinas dan kendaraan khusus/lapangan. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai salah satu tugas pokoknya ialah bertanggung jawab pada asset daerah yang dimiliki. Provinsi Jawa Barat seperti kendaraan dinas operasional. Kebijakan pemeliharaan kendaraan dinas operasional biasanya mencakup prosedur dan pedoman yang ditetapkan untuk menjaga kondisi dan keandalan kendaraan dinas. Hal ini dilakukan untuk memastikan kendaraan tetap berfungsi dengan baik, aman, dan siap digunakan dalam menjalankan tugas-tugas operasional biro. Kendaraan dinas operasional yang digunakan dalam bagian rumah tangga pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki peran yang penting dalam mendukung kelancaran aktivitas dan tugas-tugas operasional. Untuk menjaga agar kendaraan tetap berfungsi dengan baik, aman, dan siap digunakan, perlu diterapkan kebijakan pemeliharaan yang efektif dan terencana. Kebijakan pemeliharaan

kendaraan dinas operasional ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan-kendaraan tersebut selalu dalam kondisi yang optimal, mengurangi risiko kegagalan mekanis, dan memaksimalkan masa pakai kendaraan. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat tercipta manajemen pemeliharaan yang sistematis, efisien, dan transparan.

Selain itu, implementasi kebijakan ini juga bertujuan untuk meminimalkan biaya pemeliharaan jangka panjang dengan mencegah kerusakan yang lebih serius pada kendaraan, mengoptimalkan penggunaan suku cadang, dan meningkatkan ketersediaan kendaraan operasional. Dengan demikian, akan terjadi peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keselamatan dalam menjalankan tugas-tugas operasional biro. Penerapan kebijakan pemeliharaan kendaraan dinas operasional ini melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pengemudi kendaraan, pemilik kendaraan, tim teknis pemeliharaan, dan manajemen biro. Kolaborasi dan komunikasi yang baik antara semua pihak akan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini. Adapun langkah-langkah pemeliharaan yang harus diikuti, jadwal pemeliharaan yang ditetapkan, prosedur penanganan kendaraan darurat, pelaporan dan pencatatan yang harus dilakukan, serta kriteria penggantian kendaraan. Adanya panduan ini diharapkan dapat memastikan bahwa

kendaraan dinas operasional tetap berada dalam kondisi yang prima dan siap digunakan kapan pun dibutuhkan.

Kendaraan yang tidak terawat dengan baik cenderung mengalami kerusakan yang sering, memerlukan perbaikan yang mahal, dan konsumsi bahan bakar yang tinggi. Melalui pemeliharaan yang teratur, organisasi dapat mencegah kerusakan yang serius dan mengoptimalkan efisiensi bahan bakar. Dengan demikian, biaya operasional kendaraan dapat ditekan dan anggaran organisasi dapat digunakan secara efisien. Pemeliharaan kendaraan operasional dinas penting untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut memenuhi persyaratan regulasi dan standar keamanan yang ditetapkan. Pemeriksaan rutin, perawatan berkala, dan penggantian suku cadang yang sesuai ialah bagian penting dari upaya menjaga keamanan dan kepatuhan organisasi terhadap peraturan yang berlaku. Untuk menjaga pemeliharaan yang baik, masa pakai kendaraan operasional dinas dapat diperpanjang. Hal ini berarti organisasi dapat memanfaatkan kendaraan dalam jangka waktu yang lebih lama sebelum harus menggantinya dengan yang baru. Pemeliharaan yang teratur juga dapat meningkatkan nilai jual kendaraan jika organisasi memutuskan untuk menjualnya di masa depan.

Adapun permasalahan sering terjadi lemahnya pengawasan terhadap aset daerah akan menyebabkan aset tersebut mengalami kerusakan yang

mengakibatkan biaya pemeliharaan aset semakin besar dan kemungkinan menghilangnya aset daerah akan menimbulkan kerugian atas keuangan daerah (Purba & Aziza, 2019). Disamping itu juga Kendaraan dinas sering digunakan dalam operasional sehari-hari yang intensif, maka akan menyebabkan tantangan dalam menjadwalkan pemeliharaan rutin sehingga dapat mengakibatkan pemeliharaan terlambat atau terlewat yang berpotensi meningkatkan risiko kegagalan dan kerusakan kendaraan. Sumber daya manusia belum memadai dimana belum memiliki tenaga ahli dalam penilaian asset dalam pemeliharaan kendaraan. Keterbatasan Sumber daya manusia dalam hal pemahaman pemeliharaan kendaraan dinas operasional

**Tabel 1.** Data Kendaraan Dinas Operasional Tahun. 2022 Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi

NO	Jenis Kendaraan	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Roda 4	239	17	256
2	Roda 2	182	15	197
	Jumlah	421	32	453

Sumber: Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jabar

Berdasarkan data tersebut diatas bahwa jenis kendaraan dinas operasional yang dimiliki Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat total keseluruhan sebanyak 453 unit terdiri dari Roda 2 sebanyak 197 unit dimana kendaraan roda 2 yang dinyatakan rusak berat 15 unit. Kendaraan roda 2 yg layak pakai

Kesuksesan sesuatu aplikasi kebijaksanaan bisa diukur ataupun diamati dari cara serta pendapatan tujuan hasil akhir (*output*) ialah: berhasil ataupun tidaknya tujuan-tujuan yang mau dicapai. Perihal ini tidak jauh berlainan dengan apa yang diutarakan oleh Meriee S. Grindle (1980) pengukuran kesuksesan aplikasi bisa diamati dari prosesnya, dengan mempersoalkan apakah penerapan program cocok dengan yang sudah ditetapkan ialah memandang pada action program dari perseorangan project serta yang kedua apakah tujuan program itu berhasil” mengambil dari buku dasar-dasar kebijaksanaan public (Leo agustino. 2012).

Adapun data kendaraan dinas operasional terdapat pada tabel dibawah ini:

sebanyak 182 unit sedangkan roda 4 yang dinyatakan rusak berat 17 unit. Dan kendaraan roda 4 yg layak pakai sebanyak 239 unit. dari data tersebut bahwa kendaraan yang dinyatakan rusak berat dalam pemeliharaannya belum optimal. Sehingga akan menghambat jalannya tugas-tugas yang telah ditetapkan atau dijadwalkan dalam penggunaan kendaraan dinas operasional. Sedangkan ketersediaan sumber daya manusia yang berkaitan dengan jumlah pegawai yang ada masih banyak jenjang pendidikan rendah dan masih banyak tidak memiliki keahlian, dalam hal ini akan mendukung jika jenis pekerjaan tertentu yang memerlukan skill atau keahlian khusus yang dimiliki.

Adapun pegawai yang berdasarkan jenjang pendidikan seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. Daftar Jumlah Pegawai**

NO	BAGIAN	PENDIDIKAN				JUMLAH
		SMP	SMA	S1	S2	
1	Administrasi Keuangan dan aset	4	20	23	17	
2	Tata Usaha	8	13	27	9	
3	Rumah Tangga	10	23	38	10	
	Jumlah	22	56	78	36	192

Sumber: Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jabar

Berdasarkan tabel diatas secara umum jumlah pegawai sebanyak 192 Orang masih kurang terdiri dari SMP 22 orang, SMA 56 orang, Sarjana (S1) 78 orang, dan Magister (S2) 36 orang dari data tersebut bahwa jumlah pegawai belum mencukupi. Namun dari segi keahlian atau skill belum memadai dalam rangka menjalankan tugas-tugas pekerjaan yang telah ditetapkan khususnya di biro umum khususnya di bidang pemeliharaan kendaraan dinas operasional. Peneliti menyadari begitu pentingnya sebuah implementasi kebijakan untuk dilaksanakan dengan baik. jika implementasi kebijakan pemeliharaan kendaraan dinas operasional dijalankan dengan baik maka akan dapat menekan kendaraan dinas operasional yang rusak. Dimana kendaraan dinas operasional ialah sarana pendukung yang sangat penting bagi kelancaran tugas-tugas operasional di luar kantor dalam memberikan pelayanan kepada pejabat, pegawai dan masyarakat dengan tetap memperhatikan tingkat kebutuhan

berdasarkan mobilitas yang ada serta aturan mengenai standar kendaraan dinas yang berlaku.

Berdasarkan paparan diatas, Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan Riset dengan judul: Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat  
Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah Riset diatas. Peneliti uraikan pertanyaan Riset sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Adakah ada kendala dalam implementasi kebijakan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan dalam mengatasi

kendala dalam implementasi kebijakan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

### **Tujuan Riset**

Bersumber pada kesimpulan permasalahan diatas, Ada pula tujuan riset ini buat mengenali serta menganalisa selaku selanjutnya:

1. Implementasi kebijakan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kendala-kendala apa saja dalam implementasi kebijakan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **Model Implementasi Kebijakan**

Kebijaksanaan publik di implementasikan oleh badan- badan pemerintah. Badan- badan itu melakukan profesi penerapan kebijaksanaan itu hari untuk hari alhasil diharapkan mengarah kemampuan kebijaksanaan. Bagi Agusttino (2020) mengatakan sebagian bentuk filosofi aplikasi kebijaksanaan selaku

selanjutnya: Aplikasi kebijaksanaan itu pada prinsipnya ialah metode ataupun tahap yang dicoba supaya suatu kebijaksanaan bisa menggapai tujuannya, oleh Mazmanian serta Sabatier (1983) dalam (Warjio Afandi 2015) diucap selaku usaha melakukan ketetapan. Sebaliknya bagi George C. Edward III (1985) dalam Agustino (2020) dimana bentuk aplikasi kebijaksanaan yang berspektif maksimum down. Edward III, menancapkan bentuk aplikasi kebijaksanaan publiknya dalam Direct serta Indirect on Implementation. Dalam pendekatan filosofi ini dipengaruhi oleh 4 variable, ialah( 1) Komunikasi,( 2) sumber daya,( 3) catatan, serta( 4) bentuk birokrasi, lebih jelasnya bisa dijabarkan selaku selanjutnya:

- a) Komunikasi, ialah kesuksesan aplikasi kebijaksanaan meminta supaya implementor mengenali apa yang wajib dicoba, dimana yang jadi tujuan serta target kebijaksanaan wajib dikirimkan pada golongan target( sasaran group), alhasil hendak kurangi bias aplikasi.
- b) Sumber daya, walaupun isi kebijaksanaan sudah dikomunikasikan dengan cara nyata serta tidak berubah- ubah, namun bila implementor kekurangan sumberdaya buat melakukan, hingga aplikasi tidak hendak berjalan efisien. Pangkal energi itu bisa

berbentuk pangkal energi orang, misalnya kompetensi implementor serta sumber energi keuangan.

- c) Catatan, ialah karakter serta karakter yang dipunyai oleh implementor, semacam komitmen, kejujuran, watak demokratis. Bila implementor mempunyai catatan yang bagus, hingga implementor itu bisa melaksanakan kebijaksanaan dengan bagus semacam apa yang di idamkan oleh kreator kebijaksanaan. Kala implementor mempunyai tindakan ataupun perspektif yang berlainan dengan kreator kebijaksanaan, hingga cara aplikasi kebijaksanaan pula jadi tidak efisien.
- d) Bentuk Birokrasi, Bentuk badan yang bekerja menerapkan kebijaksanaan mempunyai akibat yang penting kepada aplikasi kebijaksanaan. Pandangan dari bentuk badan ialah Standard Operating Procedure( SOP) serta fragmentasi. Bentuk badan yang sangat jauh hendak mengarah melemahkan pengawasan serta memunculkan red- tape, ialah metode birokrasi yang kompleks serta lingkungan, yang menghasilkan kegiatan organisasi tidak fleksibel.

### **Pemeliharaan Kendaraan Maintenance**

Manajemen pemeliharaan ialah campuran dari seluruh aksi teknis serta administratif yang bermaksud buat menjaga peninggalan ataupun sistem, ataupun mengembalikan kondisi awal alhasil bisa melaksanakan guna aktivitas pembedahan. Pemeliharaan amat dipikirkan dalam industri sebab diperlukan buat melindungi peninggalan industri. Tujuan dari guna ini ialah melestarikan peninggalan atau keahlian peninggalan itu buat memproduksi suatu dengan cara nyaman serta murah( Peng, K. (2016).

### **SOP Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional**

SOP pemeliharaan kendaraan dinas operasional pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat biasanya mencakup prosedur, tanggung jawab, dan langkah-langkah yang harus diikuti dalam menjaga kondisi dan kinerja kendaraan dinas. SOP ini mungkin mencakup hal-hal seperti perencanaan pemeliharaan, jadwal perawatan, perbaikan kendaraan, penggantian suku cadang, pemantauan kondisi kendaraan, pelaporan, dan manajemen dokumen terkait pemeliharaan.

Pedoman umum yang dapat menjadi panduan dalam pemeliharaan kendaraan dinas operasional:

1. Perencanaan Pemeliharaan: Buatlah rencana pemeliharaan yang terperinci untuk setiap kendaraan dinas. Rencana ini harus mencakup jadwal perawatan rutin, inspeksi

berkala, dan penggantian suku cadang yang diperlukan.

2. Perawatan Preventif: Lakukan perawatan preventif secara teratur, termasuk pergantian oli, filter, dan pelumasan. Pastikan perawatan ini dilakukan sesuai dengan panduan produsen kendaraan dan interval pemeliharaan yang direkomendasikan.
3. Inspeksi Berkala: Lakukan inspeksi berkala pada kendaraan untuk mendeteksi kerusakan atau kegagalan potensial. Periksa sistem kelistrikan, sistem kaki-kaki, sistem rem, dan komponen lainnya secara teratur.
4. Pemantauan Kondisi: Gunakan teknologi dan perangkat pemantauan kondisi kendaraan, seperti sensor dan sistem pemantauan otomatis, untuk mendapatkan informasi tentang kinerja dan kondisi kendaraan secara real-time. Hal ini dapat membantu mendeteksi masalah dengan cepat dan mengambil tindakan yang diperlukan.
5. Penggantian Suku Cadang: Pastikan penggantian suku cadang dilakukan dengan komponen yang berkualitas dan sesuai dengan spesifikasi produsen. Gunakan suku cadang asli atau yang direkomendasikan oleh produsen kendaraan untuk memastikan kinerja yang optimal.
6. Catat dan Dokumentasikan: Selalu catat dan dokumentasikan semua aktivitas pemeliharaan yang dilakukan pada kendaraan dinas. Ini

mencakup catatan perawatan, inspeksi, perbaikan, dan penggantian suku cadang. Dokumentasi ini penting untuk melacak riwayat pemeliharaan dan mengidentifikasi pola masalah yang berulang.

7. Pelatihan dan Kesadaran Karyawan: Berikan pelatihan kepada pengemudi kendaraan dinas tentang pentingnya pemeliharaan kendaraan yang baik dan tanda-tanda kerusakan yang perlu diperhatikan. Tingkatkan kesadaran karyawan terhadap pentingnya melaporkan masalah atau kegagalan yang mereka temui.
8. Pengaturan Pemeliharaan Eksternal: Jika diperlukan, tetapkan hubungan dengan bengkel atau penyedia layanan eksternal yang dapat membantu dalam pemeliharaan kendaraan dinas. Pastikan penyedia layanan memiliki reputasi yang baik dan kompetensi dalam pemeliharaan kendaraan.

### **Kerangka Pemikiran**

Riset ini mengenai Implementasi kebijakan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Implementasi kebijakan ini didasarkan pada kebijakan sebagai Input Hyaitu:

1. PP No 27 tahun 2014 Tentang Barang Milik Daerah
2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 3 Tahun 2011 Tentang Kendaraan Dinas

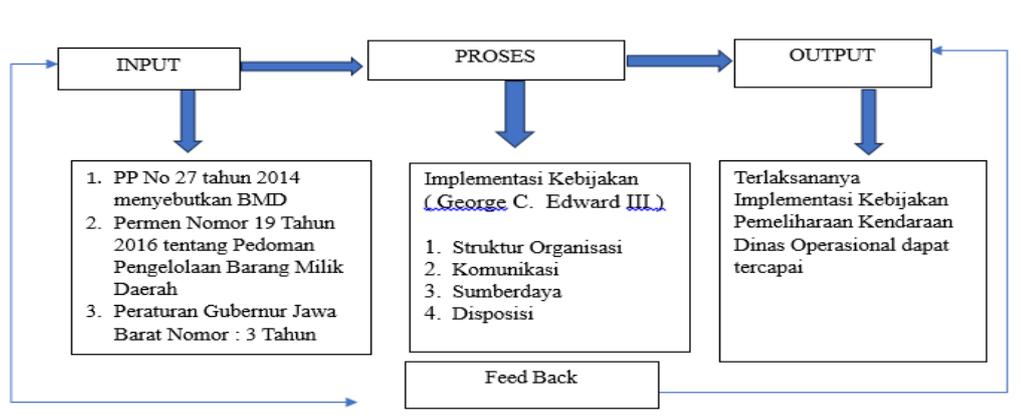
4. Sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun non manusia dimana sumberdaya manusia sebagai penanggungjawab dan pengguna dari pada kendaraan dinas operasional. Sedangkan sumber daya non manusia disini ialah sarana prasarana yaitu berupa kendaraan dinas oprasional dalam bentuk roda empat dan roda dua sebagai asset daerah Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Untuk memudahkan pemahaman secara menyeluruh terhadap Riset ini. kerangka pemikiran sebagai konsep kunci yang memberikan gambaran landasan teori yang digunakan dalam menganalisis ialah teori model

implementasi kebijakan dalam Riset ini sebagai Proses yakni menurut George Edward III (1980) dalam Agustino (2020) yaitu terdapat empat faktor yang sama-sama saling mempengaruhi agar implemntasi kebijakan tercapai yakni:

- a) Komunikasi,
- b) Sumberdaya.
- c) Disposisi.
- d) Struktur Birokrasi,

Sedangkan Ouput dari Riset ialah agar terlaksananya Implementasi kebijakan pemeliharaan kendaraan dinas operasional pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tercapai. Seperti yang tergambar pada kerangka pemikiran dibawah ini:



**Gambar 1.** Kerangka Pemikiran Riset

Berdasarkan pada konsep kunci dalam kerangka pemikiran yang digambarkan diatas, maka hipotesis Riset sebagai berikut: “Jika implementasi kebijakan dilaksanakan berdasarkan aspek komunikasi, sumber

daya, disposisi/tingkah laku dan struktur birokrasi, maka tujuan kebijakan pemeliharaan kendaraan dinas operasional dapat tercapai.

## **METODE**

Metode Riset yang digunakan ialah metode Riset kualitatif. Menurut Creswell (2019) "Qualitative research is an approach for exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem" Riset kualitatif lebih menekankan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia. Sedangkan Moleong (2021) mengemukakan Riset pada hakikatnya ialah suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran.

Informan riset ialah narasumber yang merujuk pada seorang yang mengerti terpaut dengan subjek riset dan sanggup membagikan pemaparan mengenai poin riset yang dinaikan (Sugiyono, 2019) Informan disini ialah orang yang membagikan data. Ada pula informan sebesar 5 orang terdiri dari arahan, karyawan, ketua alat transportasi serta pengemudi. Sumber informasi ialah informasi pokok serta informasi skunder Metode determinasi informan dalam riset ini dipakai metode purposive sampling Bagi (Sugiyono, 2017) purposive sampling ialah metode pengumpulan sampel pangkal informasi dengan estimasi khusus.

Metode pengumpulan informasi lewat pemantauan (observasi), interview (tanya jawab) serta pemilihan. Sebaliknya Metode keabsahan informasi yang dipakai ialah Metode triangulasi informasi. Metode analisa

informasi yang dipakai dalam riset ini lewat: pengurangan informasi, serta penyajian informasi dan menarik kesimpulan (Miles serta Huberman, 1992).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan observasi dan wawancara serta melalui pertimbangan secara teoritis terkait Implementasi kebijakan pemeliharaan kendaraan dinas operasional pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan dasar teori struktur organisasi, komunikasi, sumberdaya, dan disposisi diperoleh hasil sebagai berikut:

Struktur organisasi memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan pemeliharaan kendaraan dinas operasional. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat perlu memiliki struktur yang jelas dan terorganisir dengan baik untuk menjalankan kebijakan tersebut. Ini melibatkan penunjukan unit atau divisi yang bertanggung jawab secara khusus untuk pemeliharaan kendaraan dinas operasional. Hal ini memudahkan pengaturan tugas dan tanggung jawab, serta memastikan koordinasi yang efektif dalam menjalankan kebijakan tersebut. Dalam struktur organisasi yang baik, tanggung jawab dan wewenang terkait pemeliharaan kendaraan harus jelas dan terdefinisi dengan baik. Hal ini memungkinkan adanya pemisahan tugas dan kewenangan yang jelas dalam melaksanakan kebijakan pemeliharaan kendaraan. Dalam hasil implementasi

kebijakan pemeliharaan kendaraan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, struktur organisasi telah mendukung proses pemeliharaan dengan baik. Setiap unit atau divisi terkait memiliki tanggung jawab yang jelas dalam pemeliharaan kendaraan, seperti unit pengadaan, unit perawatan, dan unit penggantian kendaraan yang sudah usang. Penting untuk terus mengoptimalkan struktur organisasi agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan operasional. Evaluasi berkala dapat membantu mengidentifikasi apakah ada perubahan atau penyesuaian yang perlu dilakukan dalam struktur organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemeliharaan kendaraan dinas.

Komunikasi yang baik sangat penting dalam implementasi kebijakan pemeliharaan kendaraan dinas operasional. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat perlu memastikan adanya alur komunikasi yang efisien antara unit pemeliharaan kendaraan dengan pengguna kendaraan dinas. Komunikasi yang lancar memungkinkan pemberian informasi yang jelas mengenai jadwal pemeliharaan, perawatan rutin, dan pelaporan masalah kendaraan. Dengan demikian, upaya pemeliharaan kendaraan dapat dilakukan secara tepat waktu dan dengan efisiensi yang tinggi. Informasi yang tepat waktu dan akurat mengenai kondisi kendaraan, jadwal pemeliharaan, serta perubahan atau kebijakan terbaru harus disampaikan

dengan baik kepada semua pihak terlibat. Dalam hasil implementasi kebijakan pemeliharaan kendaraan, komunikasi antar unit di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat terbilang baik. Terdapat sistem komunikasi internal yang efektif untuk memberikan informasi terkini tentang pemeliharaan kendaraan, termasuk laporan kondisi kendaraan dan jadwal pemeliharaan. Tetap menjaga komunikasi yang efektif dengan melibatkan seluruh pihak terkait dalam proses pemeliharaan kendaraan akan membantu menghindari kesalahpahaman dan memastikan pemeliharaan berjalan dengan lancar. Selain itu, teknologi komunikasi yang canggih dapat digunakan untuk mempermudah dan mempercepat pertukaran informasi terkait pemeliharaan kendaraan.

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat perlu menyediakan sumberdaya dana, personel, dan fasilitas yang cukup dan baik untuk menjalankan kegiatan pemeliharaan. Hal ini yang ialah kendala di lapangan dari hasil observasi dan wawancara. Ini mencakup perawatan rutin, perbaikan, penggantian suku cadang, dan kegiatan terkait lainnya. Dengan sumberdaya yang memadai, pemeliharaan kendaraan dapat dilakukan dengan baik, sehingga memastikan kendaraan dinas tetap dalam kondisi yang baik dan dapat digunakan dengan optimal. Implementasi kebijakan pemeliharaan kendaraan memerlukan sumberdaya

yang memadai, termasuk anggaran, tenaga kerja, peralatan, dan suku cadang. Sumberdaya yang memadai akan mendukung kelancaran dan kualitas pemeliharaan kendaraan dinas. Hasil implementasi kebijakan pemeliharaan kendaraan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa sumberdaya yang tersedia telah cukup memadai. Terdapat alokasi anggaran yang memadai untuk pemeliharaan kendaraan, serta tersedianya tenaga kerja yang terlatih dan berkompeten dalam melakukan pemeliharaan. Penting untuk terus memantau dan mengelola sumberdaya dengan efisien. Evaluasi secara berkala tentang kecukupan anggaran dan ketersediaan suku cadang serta peningkatan kualitas tenaga kerja akan membantu mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan atau peningkatan untuk mendukung pemeliharaan kendaraan yang lebih baik.

Disposisi yang baik ialah elemen penting dalam implementasi kebijakan pemeliharaan kendaraan dinas operasional. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat perlu memiliki prosedur yang jelas dalam mengelola pemeliharaan kendaraan, termasuk pelaporan masalah dan tindakan yang diperlukan. Disposisi yang efektif melibatkan pemantauan yang cermat terhadap kendaraan dinas, penjadwalan pemeliharaan yang tepat waktu, penanganan masalah secara cepat dan efisien, serta dokumentasi yang akurat. Dengan disposisi yang

baik, kendaraan dinas dapat dipelihara dengan baik, mencegah kerusakan yang lebih parah, dan meminimalkan gangguan dalam penggunaan kendaraan tersebut. Disposisi dalam konteks ini merujuk pada keputusan terkait penggunaan kendaraan dinas, baik dalam hal perawatan, perbaikan, penggantian, atau penyingkiran kendaraan yang sudah tidak memenuhi standar keselamatan atau efisiensi. Hasil implementasi kebijakan pemeliharaan kendaraan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa disposisi kendaraan dinas operasional sudah diatur dengan baik. Kendaraan yang membutuhkan perbaikan atau pemeliharaan rutin ditangani dengan tepat waktu, dan ada kebijakan penggantian kendaraan yang sudah usang atau tidak layak pakai. Tetap memperhatikan kriteria dan standar disposisi kendaraan dengan ketat akan membantu mencegah penggunaan kendaraan yang tidak aman atau tidak efisien. Evaluasi berkala tentang usia dan kondisi kendaraan akan membantu mengidentifikasi kendaraan yang membutuhkan penggantian, sehingga flotasi kendaraan dinas dapat dijaga dalam kondisi optimal.

Keseluruhan implementasi kebijakan pemeliharaan kendaraan dinas operasional pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat telah menghasilkan hasil yang baik. Dengan memperhatikan dasar teori struktur organisasi, komunikasi,

sumberdaya, dan disposisi, Biro Umum telah berhasil menjaga kondisi kendaraan dinas dengan baik dan meningkatkan efisiensi operasional dalam pemeliharaan kendaraan dinas. Dengan mengoptimalkan faktor-faktor tersebut, kebijakan pemeliharaan kendaraan dapat dijalankan dengan baik, sehingga kendaraan dinas tetap dalam kondisi yang baik, tersedia untuk digunakan, dan meminimalkan gangguan operasional. Meskipun demikian, tetap diperlukan evaluasi berkala dan peningkatan dalam semua aspek untuk memastikan pelayanan pemeliharaan kendaraan yang lebih baik di masa mendatang.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan implementasi kebijakan pemeliharaan kendaraan dinas operasional pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan mempertimbangkan dasar teori struktur organisasi, komunikasi, sumberdaya, dan disposisi, dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi yang jelas dan terorganisir dengan baik sangat penting dalam menjalankan kebijakan pemeliharaan kendaraan dinas operasional. Dengan adanya unit atau divisi khusus yang bertanggung jawab atas pemeliharaan kendaraan, tugas dan tanggung jawab menjadi lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini memastikan bahwa pemeliharaan kendaraan dapat dilakukan secara efisien dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Komunikasi yang

efisien antara unit pemeliharaan kendaraan dengan pengguna kendaraan dinas sangat penting dalam implementasi kebijakan. Alokasi sumberdaya yang memadai ialah suatu keharusan, seperti dana, personel, dan fasilitas, menjadi kunci dalam menjalankan kebijakan pemeliharaan kendaraan dinas operasional. Dengan adanya dukungan sumberdaya yang baik, pemeliharaan kendaraan dapat dilakukan secara konsisten dan berkualitas. Oleh karena itu, penting bagi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk memastikan bahwa sumberdaya yang diperlukan telah dialokasikan dengan baik. Prosedur disposisi yang baik sangat penting dalam mengelola pemeliharaan kendaraan dinas. Dengan disposisi yang efektif, masalah kendaraan dapat ditangani secara cepat dan tepat, serta dilakukan pemeliharaan secara teratur. Saran untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut ialah melakukan evaluasi secara berkala terhadap struktur organisasi yang ada, memastikan bahwa unit pemeliharaan kendaraan dinas memiliki peran dan tanggung jawab yang tepat. Pastikan bahwa informasi mengenai pemeliharaan kendaraan, jadwal perawatan, dan pelaporan masalah kendaraan disampaikan secara jelas dan tepat waktu. Komunikasi yang baik akan membantu dalam menjaga kendaraan tetap dalam kondisi baik dan siap digunakan. Alokasi sumberdaya, seperti dana, personel, dan fasilitas,

telah diperhitungkan dengan baik dan memadai untuk mendukung kegiatan pemeliharaan kendaraan. Meninjau kembali prosedur disposisi yang ada untuk menangani masalah kendaraan dinas. Pastikan bahwa prosedur tersebut mencakup tindakan yang cepat dan tepat dalam menangani masalah, serta dokumentasi yang akurat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Agustino. Leo, (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Alvian Ardiansyah, dkk, Analisis Pemeliharaan Pada Kendaraan Operasional PKP-PK Di Bandar Udara Adi Soemarmo Solo. Vol 1, No 1 (2022), 1 oktober 2022, DOI: 10.57235/aurelia.v1i1.21, <http://www.rayyanjurnal.com/index.php/aurelia/article/view/21>

Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PENERBIT PT.PUSTAKA INDONESIA PRESS, 2021. <https://repository.ung.ac.id/en/karyailmiah/show/89>

Creswell. J.W, (2019), *Qualitative research: a guide to design and implementasi*. In Kiamanesh A, Danaye Tous M, Translator, Tehran.

Dye R Thomas. (2008). *Understanding Public Policy*. Pearson Education' Upper Saddle River' New Jersey

Edwar III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC, Congressional Quarterly Press

Fernando Lumbantobing, 20 Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Dalam Rangka Peningkatan Kerja Pimpinan Dewan Di Sekretariat DPRD Tapanuli Utara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Grindle, Marilee. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/16062>

Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.9

Jumria Mansur Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. Diakses Pada Tanggal 1 Juli 2020 Pukul 22.45 WIB (Jurnal) 7713-24106-1-PB.pdf

Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

- Peng, K. (2016). Equipment Management in the PostMaintenance Era. In Equipment Management in the Post Maintenance Era Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Kendaraan Dinas adalah kendaraan. <http://eprints.pknstan.ac.id/791/>
- Purba, R. B., & Aziza, N. (2019). Pengelolaan Aset Tetap Daerah Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, Vol 9 No 2, 152 –164. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/465>.
- Situmorang Chazali. (2016). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). Social Security Development Institute (SSDI). Yogyakarta dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.6 no. 2. ISSN: 1192- 101
- Sugiyono (2019), *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung, CV. Alfabeta
- Teiseran, Martin T. (2003), *Merawat dan Memelihara Mobil*. Yogyakarta: Kanisius.